

## Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi

Suhartono<sup>1\*</sup>, Agus Pahrudin<sup>2</sup>, Tasdiq<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Nurul Huda

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\* E-mail: [suhartono@unuha.ac.id](mailto:suhartono@unuha.ac.id), [agus.pahrudin@radenintan.ac.id](mailto:agus.pahrudin@radenintan.ac.id), [tasdiq@unuha.ac.id](mailto:tasdiq@unuha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : (1) konsep dasar demokrasi pendidikan Islam meliputi; pengertian demokrasi pendidikan, pendidikan Islam sebagai landasan demokrasi pendidikan, menekankan nilai-nilai keadilan, pemikiran kritis, musyawarah, kepemimpinan adil, keterbukaan terhadap keragaman, pendidikan karakter dan pemberdayaan individu. (2) prinsip-prinsip demokrasi pendidikan Islam mencakup musyawarah, keadilan kebebasan berpendapat, transparansi. (3) Implikasi bagi dosen dan tenaga kependidikan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan akademik, pengelolaan sumber daya, pengembangan berpikir kritis, pengembangan kurikulum, dan tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa, implikasinya melibatkan partisipasi aktif, pengembangan keterampilan demokrasi, riset, nilai-nilai demokratis Islam, serta pertumbuhan pribadi dan spiritual. (4) Tantangan dan hambatan melibatkan regulasi, intoleransi, pengaruh eksternal, keterbatasan sumber daya, dan tantangan multikulturalisme. Integrasi prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis di perguruan tinggi.

**Kata kunci:** demokrasi, pendidikan Islam

### PENDAHULUAN

Dalam rahmat dan kearifan-Nya, Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat-Nya melalui ayat-ayat suci Al-qur'an. Salah satu ayat-ayat Al-qur'an yang menyoroti sikap dan prinsip dalam berinteraksi dalam konteks pendidikan, termasuk dalam membentuk sistem pendidikan yang adil dan inklusif, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari keteladanan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Al-qur'an Surah Ali Imran ayat 159 :

قَبِيْا رَّحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ لِيْنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. ("Qur'an Kemenag," 2023)

Pendidikan tinggi, sebagai wahana untuk mengejar pengetahuan dan pembentukan karakter, memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Di era globalisasi ini, perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab atas transfer ilmu pengetahuan tetapi juga perlu menjembatani antara kebutuhan dunia akademis dengan tuntutan kemajuan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 isinya tentang , pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa(UU.No.20 Th 2003, n.d.).

Sejalan dengan hal tersebut, Demokrasi, sebagai prinsip dalam sistem pemerintahan yang mendasarkan keputusan pada partisipasi dan keterlibatan semua pihak, menjadi aspek krusial dalam pembentukan lingkungan pendidikan yang inklusif dan dinamis. Temuan penelitian (Drerup, 2019) mengemukakan bahwa tuntutan dan persyaratan untuk mencapai otonomi, penghargaan terhadap kebijakan politik, dan pendidikan toleransi sebagai kebijakan demokratis saling mendukung dan terkait satu sama lain.

Penerapan demokrasi dalam konteks pendidikan Islam di perguruan tinggi memiliki relevansi yang sangat signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga progresif semakin meningkat. Mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu sistem pendidikan Islam seharusnya didasarkan pada perkembangan pemikiran keislaman yang autentik, orisinal, dan memadai (Panjwani, 2012). Demokrasi pendidikan Islam menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan terciptanya lingkungan akademis yang adil, terbuka dan memperhitungkan keberagaman ideologi dan pandangan.

Namun, perlu dicatat bahwa implementasi demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan dan hambatan mungkin muncul, termasuk konflik antara otoritas akademis dan prinsip demokrasi, serta perbedaan interpretasi mengenai bagaimana demokrasi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, penelitian mengenai konsep demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan yang urgen. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan dan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, diharapkan mampu menghasikan paradigma pendidikan yang holistik, berbasis keadilan, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

## **METODE/EKSPERIMEN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yang bertujuan untuk meyelidiki dan menganalisis literatur-literatur terkait konsep demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber informasi dari literatur, artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Studi kepustakaan memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk memahami dasar konseptual demokrasi pendidikan Islam, melibatkan tinjauan terhadap konsep demokrasi, pendidikan Islam, dan interaksi keduanya di tingkat perguruan tinggi. Analisis literatur akan mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam serta mengeksplorasi pengalaman dan pandangan terdahulu mengenai implementasi demokrasi dalam konteks pendidikan Islam.

Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber literatur untuk merinci berbagai aspek demokrasi pendidikan Islam, termasuk peran mahasiswa, dosen, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika di perguruan tinggi Islam. Selain itu, studi kepustakaan juga akan digunakan untuk mengevaluasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengaplikasikan konsep demokrasi dalam konteks pendidikan Islam.

Dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana demokrasi dapat diintegrasikan dengan pendidikan Islam di perguruan tinggi, serta mengeksplorasi solusi atau rekomendasi berdasarkan temuan literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Dasar Demokrasi Pendidikan Islam**

#### **1. Makna Demokrasi Pendidikan**

Demokrasi pendidikan Islam merujuk pada suatu sistem pendidikan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, namun dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Artinya, dalam konteks pendidikan Islam, demokrasi tidak hanya mencakup aspek-aspek

politik dan sosial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap proses pendidikan. Dari perspektif ilmiah dan berdasarkan bukti empiris, demokrasi dapat berperan secara heuristik dalam mendukung peningkatan pemerintahan di bidang pendidikan. (Maxcy, 1985).

Demokrasi pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga proses pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Pendidikan Islam sebagai Landasan Demokrasi Pendidikan

Pendidikan Islam dapat dianggap sebagai landasan yang kuat untuk membangun demokrasi pendidikan di perguruan tinggi. bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi fondasi yang mendukung demokrasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi :

### a. Pemahaman Nilai-nilai Keadilan (*Understanding the Values of Justice*)

Pendidikan Islam menekankan nilai-nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini dapat mementuk dasar bagi sistem pendidikan yang demokratis, dimana hak dan tanggung jawab setiap individu diakui secara adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Nilai keadilan sosialnya lebih kentara artinya, kewajiban pribadi yang semula hanya kembali kepada pribadinya bisa beralih menjadi kemanfaatan kepada soaial, (Lalu Muhammad Nurul Wathan, 2020)

### b. Pengembangan Pemikiran Kritis (*Development of Critical Thinking*)

Pemikiran kritis merujuk pada kemampuan seseorang untuk secara kritis menganalisis, mengevaluasi, dan merespons informasi atau situasi. Hal ini seringkali terkait dengan proses berpikir yang mendalam, logis, dan reflektif untuk memahami suatu masalah atau konsep. Saat pemikiran kritis dieksplorasi, biasanya hal itu dipahami dalam konteks proses kognitif individu yang terlibat dalam pemahaman dan penilaian terhadap informasi yang diterima (Davies & Barnett, 2015). Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis. Pendidikan Islam di perguruan tinggi dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengajak mereka untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan menerapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

### c. Musyawarah dan konsultasi (*Deliberation and consultation*)

Musyawarah dan konsultasi dalam Islam adalah bentuk model partisipatif yang dapat diadopsi dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa, dosen dan staf administratif dalam proses pengambilan keputusan dapat mencerminkan semangat musyawarah dalam Islam. Hasil penelitian (Bunyamin, 2017) menjelaskan musyawarah merupakan suatu kegiatan saling tukar pendapat untuk memperoleh keputusan terbaik dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

### d. Pengembangan Kepemimpinan yang Adil (*Equitable Leadership Development*)

Pendidikan Islam mengajarkan tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi dapat mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan dan pengembangan institusi pendidikan. Menurut Jacobson yang dikutip (Shah, 2013) Seorang pemimpin pendidikan yang menjadi contoh, terutama dalam konteks umat Islam, perlu memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai apa pun yang terjadi, sejauh mana mereka mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam perjalanan mereka sendiri.

### e. Keterbukaan terhadap Keragaman (*Openness to Diversity*)

Islam mengajarkan tentang toleransi dan keterbukaan terhadap keragaman. Perguruan tinggi yang menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap individu dihargai tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Temuan berdasarkan pengamatan empiris menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara keberagaman asosiasi dan tingkat toleransi. (Rapp & Freitag, 2015)

### f. Penekanan pada Pendidikan Karakter (*Emphasis on Character Education*)

Pendidikan Islam menitikberatkan pada pengembangan karakter yang baik. Perguruan tinggi dapat menggunakan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam sebagai fondasi untuk membentuk

karakter mahasiswa, yang pada gilirannya dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam perilaku mereka. Hasil penelitian (Ferkany & Creed, 2014) Pendidikan karakter adalah bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan secara praktis, yaitu menerapkan sifat-sifat yang kuat dan stabil secara intrinsik. Ini mencakup aspek psikis yang harmonis dan melibatkan kecerdasan praktis, yang menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia baik secara individu maupun kolektif. (Smagorinsky, 2018) Perpektif ini cenderung menghadirkan kembali masa lalu yang telah terlupakan, dimana masyarakat hidup dalam keadaan lebih baik dengan adab yang tinggi dan moralitas yang beruasa. masa tersebut dianggap sebagai periode yang perlu dipulihkan melalui upaya pendidikan karakter agar masyarakat dapat kembali kuat, bersatu, dan saleh dalam membangun tatanan sosial.

#### g. Pemberdayaan Individu (*Individual Empowerment*)

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai kondisi psikologis di mana empat aspek kognitif individu, yaitu pemahaman makna, kemampuan, pilihan, dan dampak, bekerja secara bersinergi untuk mengembangkan sikap proaktif, positif, dan penuh keyakinan terhadap pekerjaan seseorang. Individu merasakan pemberdayaan pada tingkat pribadi sebagai peningkatan kepuasan kerja dan kemampuan yang lebih efektif dalam memenuhi harapan peran kerja, serta menunjukkan perilaku inovatif yang lebih tinggi dalam lingkungan kerja. Hasil penelitian (Conger, 2003) Individu merasakan pemberdayaan pada tingkat pribadi sebagai peningkatan kepuasan kerja dan kemampuan yang lebih efektif dalam memenuhi harapan peran kerja, serta menunjukkan perilaku inovatif yang lebih tinggi dalam lingkungan kerja.

Islam mengajarkan pemberdayaan individu melalui pengetahuan dan keterampilan. Perguruan tinggi dapat menjadi wadah untuk memberdayakan mahasiswa, memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pendidikan yang menciptakan lingkungan yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan keadilan. Hal ini tidak hanya membangun pemimpin masa depan yang bertanggung jawab tetapi juga menciptakan masyarakat yang dinamis dan progresif.

### 3. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan Islam

Prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pendidikan Islam dapat bervariasi tergantung pada Interpretasi dan implementasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau komunitas muslim. Namun prinsip umum yang sering dikaitkan dengan demokrasi dalam konteks pendidikan Islam melibatkan partisipasi aktif, keadilan, transparansi, kebebasan. Beberapa prinsip yang dianggap relevan antara lain adalah :

#### a. Musyawarah (*Discussion*)

Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menekankan pentingnya mengambil keputusan secara bersama-sama melalui proses musyawarah dan konsultasi, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kesepakatan bersama. (Muhammad Hanafi, 2013) dalam penelitiannya menjelaskan Musyawarah yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam menegaskan penghormatan yang tinggi terhadap keadilan yang bersumber dari hukum Allah SWT. dalam konteks musyawarah, tidak ada penerimaan terhadap pandangan individualisme yang merupakan dasar dari liberalisme (kebebasan), ini karena manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kewajiban untuk saling bahu membahu melalui prinsip gotong royong, seperti diungkapkan dalam bahasa Indonesia yang murni. Kebebasan dalam musyawarah tidak dipandang sebagai hasil dari individualisme, kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu. Sebaliknya, kebebasan tersebut memiliki batasan yang sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh Allah.

#### b. Keadilan dan kesetaraan (*Justice and equality*)

Prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut agar semua anggota komunitas pendidikan diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang status sosial ekonomi atau budaya. Semua individu harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang untuk berkembang.

Kesetaraan dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan proses pendidikan yang adil (keadilan) dan kesetaraan, (Rahman et al., 2020).

c. Kebebasan berpendapat (*Freedom of opinion*)

Prinsip ini menegaskan pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka, selama itu tidak melanggar nilai-nilai etika dan moral Islam. Kebebasan berpendapat mendukung terbentuknya lingkungan pendidikan yang dinamis dan kritis. Hal ini sejalan dengan Penelitian dari (Brüssow, 2022) menjelaskan bahwa Milton, Locke, Montesqueieu dan Mill, meyakini bahwa kebebasan berpendapat dan berbicara adalah hak fundamental dalam masyarakat terbuka, tetapi mereka menyadari bahwa ada batasan yang perlu diterapkan ketika hal tersebut dapat menimbulkan risiko kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat.

d. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi menekankan pentingnya menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka. Dalam konteks pendidikan Islam, transparansi dapat mencakup informasi tentang kebijakan pendidikan, pengelolaan keuangan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program di lembaga pendidikan, (Wahyudin, 2021)

## **B. Implikasi Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi**

### **1. Implikasi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*)

Dosen dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di universitas/ institut/ sekolah tinggi termasuk kebijakan akademik, kurikulum dan keputusan strategis lainnya. Tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan perguruan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Syuhud, 2019) Partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, dalam segala bentuknya, akan memberikan keuntungan yang signifikan untuk meningkatkan mutu keputusan demi kemajuan organisasi.

b. Kebebasan Akademik (*Academic Freedom*)

Dosen memiliki kebebasan akademik dalam tri darma perguruan tinggi (pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Harahap, 2016) kebebasan akademis adalah prasyarat untuk seorang pecinta ilmu atau sering disebut "ilmuan" untuk dapat mengekspresikan kemampuan akal pikirannya dalam melakukan aktivitas seperti penelitian, pengkajian, pengembangan, mempublikasikan serta dapat menransformasikannya kepada generasi-generasi berikutnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur dari ajaran agama Islam itu sendiri. Tenaga kependidikan juga dapat merasakan kebebasan dalam melaksanakan tugas administratif mereka tanpa rasa takut.

c. Pengelolaan Sumber Daya

Dosen dan tenaga kependidikan kedua dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang ada di kampus (universitas/ institut/ sekolah tinggi) termasuk anggaran keuangan, fasilitas (sarana prasarana) dan program akademik. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Muhtarom et al., 2009) Penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan berkualitas di lingkungan pendidikan akan menghasilkan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk memastikan perkembangan.

d. Pengembangan Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan kemampuan individu untuk mengevaluasi suatu hal dengan merinci berdasarkan informasi yang ada. Kemampuan ini sangat esensial bagi semua orang karena dapat membawa berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan ayat Al-qur'an dalam Surah Ali Imran 190 :

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.. ("Qur'an Kemenag," 2023).

Allah mempersilahkan hamba-Nya untuk menggunakan akalNya dan memperhatikan ini dipenuhi dengan indikasi keagungan Allah SWT. Dosen di dorong untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mendorong mahasiswa untuk melakukan hal yang sama. Tenaga kependidikan dapat berpartisipasi dalam mendukung atmosfer akademik yang mendorong perkembangan pemikiran kritis di antara mahasiswa.

#### e. Pengembangan Kurikulum

Dosen dapat memberikan masukan terkait pengembangan kurikulum untuk mengakomodasi perubahan dalam pemikiran dan kebutuhan masyarakat Islam. Tenaga kependidikan dapat membantu dalam implementasi pengembangan kurikulum dan menyediakan dukungan administratif yang diperlukan. Hasil penelitian dari (Hanafi, 2014) pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup tahap penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip kurikulum, seperti asas filosofis, sosiologis, organisatoris, dan psikologis. Keputusan atau pilihan kurikulum juga didasarkan pada pertimbangan para ahli pendidikan Islam, yang menekankan aspek agama, akhlak, kebudayaan, dan manfaat sebagai faktor utama.

#### f. Tanggung Jawab Sosial

Dosen dapat merasa bertanggung jawab dalam hal memimpin dan mendorong tanggung jawab sosial di antara mahasiswa. Hal ini selaras dengan penelitian (Rumambi & Lintong, 2018) Kegiatan tanggung jawab sosial mencakup aspek sosial dan lingkungan, yang dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun, termasuk dalam Tridharma ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersifat rutin maupun tidak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa tindakan fisik, non-fisik, pelatihan, dan pemberian bantuan sosial. Tenaga kependidikan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung norma-norma etika dan tanggung jawab sosial.

Implikasi demokrasi dalam konteks pendidikan Islam harus dilakukan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan etika Islam tetap terjaga, sambil memberikan ruang untuk partisipasi aktif dari dosen dan tenaga kependidikan.

## 2. Implikasi bagi Mahasiswa

### a. Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Pembelajaran

Partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran merujuk pada keterlibatan dan kontribusi yang positif yang diberikan mahasiswa selama proses pembelajaran. Partisipasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk keaktifan dalam diskusi kelas, partisipasi dalam proyek kelompok, inisiatif untuk belajar mandiri, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler terkait pembelajaran. Temuan penelitian ini (Ng et al., 2019) menunjukkan pentingnya pendidik khusus memberikan peluang dan latihan secara rutin kepada siswanya, agar mereka dapat berlatih dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

### b. Pengembangan Keterampilan Demokrasi

Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan demokrasi, seperti kemampuan berdiskusi, berargumentasi, dan menghargai pendapat orang lain. Menurut Biesta dan Lawry yang dikutip oleh (Harriger, 2014) "Studi mengenai demokrasi" melibatkan pemahaman bagaimana generasi muda mempelajari konsep demokrasi dan penerapannya dalam berbagai konteks, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ini mencakup pembelajaran keterampilan partisipatif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Selain itu, juga melibatkan pembentukan sikap positif atau negatif terhadap demokrasi.

### c. Pemberdayaan Mahasiswa

Demokrasi pendidikan dapat memberdayakan mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan akademis mereka. Temuan penelitian dari (Back & Keys, 2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik di

lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat umum, terutama oleh bagaimana individu menanamkan nilai-nilai dari lingkungan tersebut.

Contoh : Mahasiswa diberdayakan untuk mengorganisir acara-acara akademis atau keagamaan, seperti seminar, lokakarya, atau festival budaya Islam, sehingga mereka dapat aktif berkontribusi dalam pembentukan identitas perguruan tinggi.

#### d. Pengembangan Riset bagi Mahasiswa

Riset adalah jendela menuju pemahaman mendalam, dan melalui pengembangan riset, mahasiswa memiliki kesempatan untuk meresapi kemerdekaan intelektual, kreativitas, dan kontribusi berarti. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Ardimen, 2018) Beberapa manfaat bagi mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis riset meliputi: (a) memperoleh pemahaman tentang esensi dan metode penelitian, menghilangkan ketidaknyamanan dalam menyusun skripsi di masa mendatang. (b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kemampuan menyampaikan dan membela ide. (c) mendapatkan pelatihan untuk bekerja dengan metode yang terencana dan terstruktur. (d) mengasah keterampilan kerja keras, dan (e) mendapatkan pengalaman dalam bekerja tim, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun kerjasama serta jaringan.

#### e. Pengembangan Nilai-nilai Demokratis dalam Islam

Mahasiswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokratis yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kebebasan berpendapat. Temuan penelitian (Haryanto, 2020) menjelaskan bahwa Internalisasi nilai-nilai humanisme dan demokrasi dalam pendidikan ini memiliki potensi besar untuk dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, cerdas spiritual.

#### f. Pertumbuhan pribadi dan spiritual

Mahasiswa diberi ruang untuk mengembangkan pemahaman pribadi mereka terhadap ajaran Islam melalui program-program spiritual, seperti kelompok diskusi agama dan kegiatan keagamaan lainnya. Hasil penelitian (Reymann et al., 2015) menunjukkan bahwa kedewasaan iman memiliki peran yang signifikan sebagai penentu tujuan hidup. Implikasi dari temuan ini sangat relevan di lingkungan kampus, termasuk pendekatan untuk membangun budaya institusi yang mempromosikan nilai dan moral, sambil secara bersamaan meningkatkan perkembangan kedewasaan iman dan mencapai keberhasilan di kalangan peserta didik.

### C. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik dan budaya di suatu negara atau wilayah tertentu.

Beberapa tantangan dan hambatan yang kemungkinan dihadapi :

#### a. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan Kebijakan: Adanya regulasi atau kebijakan yang membatasi kebebasan akademik dan demokrasi di perguruan tinggi. Temuan penelitian dari (Fajri, 2021) Demokrasi secara jelas menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kebebasan sipil, sementara memiliki sedikit permasalahan terkait hak-hak politik. Sementara dalam penelitian (Astari, 2021) menjelaskan dilarangnya demonstrasi adalah ketidakadilan yang nyata bagi mahasiswa. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945.

#### b. Intoleransi dan Radikalisme

Perguruan tinggi mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola pandangan-pandangan yang ekstrem atau intoleran terkait dengan agama. adanya kelompok mahasiswa atau staf yang mempromosikan ideologi radikal dapat mengganggu lingkungan akademik yang demokratis. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (Basri, Nawang Retno Dwiningrum, 2019) Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi radikalisme dapat ditemukan di antara mahasiswa, yang berkembang melalui partisipasi dalam organisasi di luar lingkungan kampus. Interaksi antara mahasiswa dan organisasi di luar kampus memiliki potensi untuk membentuk sikap radikalisme di kalangan mahasiswa

di lingkungan kampus.

#### c. Pengaruh Eksternal

Adanya tekanan eksternal dari kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi kebijakan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan akademik. Penelitian dari (Rosyad & Maarif, 2020) menegaskan bahwa tantangan global dalam bidang pendidikan akan terus muncul secara berkelanjutan, dan kita tidak dapat mengelak dari menghadapi tantangan tersebut. Penelitian dari (Jalil, 2020) mendeskripsikan bahwa di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, demokrasi agama juga mengalami tantangan dan hambatan. Kasus Ahmadiyah, Syiah, Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA), dan Front Pembela Islam (FPI) yang belakangan banyak memperoleh sorotan merupakan contoh nyata bahwa demokrasi agama mengalami tantangan yang serius.

#### d. Kurangnya Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya, baik itu keuangan atau tenaga dosen yang kurang berkualitas dapat menjadi hambatan bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan islam yang demokratis dan berkualitas. Keterbatasan sumber daya sering kali dianggap sebagai elemen kunci yang berkontribusi pada rendahnya pencapaian pembelajaran di negara-negara berkembang.

#### e. Tantangan Multikulturalisme

Perguruan tinggi seringkali memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang agama, budaya, suku, ras. Tantangan dapat muncul dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman tanpa diskriminasi. Beberapa komponen lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan, dan akan terjadi sedikit kebingungan dalam menata proses mengelola pendidikan multikultural. Sebuah tawaran pola pendidikan multikultural yang memungkinkan untuk beragam maupun berbeda dan merupakan hal yang sangat sulit untuk di persatukan, kemungkinan akan menghambat para pendidik di lapangan. (Aprilianto & Arif, 2019).

Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, penting untuk mempromosikan budaya dialog, inklusivitas, dan kebebasan akademik di perguruan tinggi. Kolaborasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, juga diperlukan untuk membangun lingkungan pendidikan yang demokratis dan menghormati nilai-nilai pluralisme.

## PENUTUP

Demokrasi pendidikan Islam di perguruan tinggi membawa konsep pendidikan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Artikel ini menyoroti pentingnya pendidikan Islam sebagai landasan demokrasi pendidikan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, pemikiran kritis muasawarah, kepemimpinan yang adil, keterbukaan terhadap keragaman, penekanan pada pendidikan karakter, dan pemberdayaan individu.

Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan Islam meliputi musyawarah, keadilan dan kesetaraan, kebebasan berpendapat, transparansi. Implikasi demokrasi pendidikan Islam terhadap dosen dan tenaga kependidikan mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan akademik, pengelolaan sumber daya, pengembangan berpikir kritis, pengembangan kurikulum, dan tanggung jawab sosial. Implikasi bagi mahasiswa melibatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan demokrasi, pengembangan riset, pengembangan nilai-nilai demokratis dalam Islam, dan pertumbuhan pribadi serta spiritual.

Beberapa tantangan dan hambatan seperti regulasi dan kebijakan yang membatasi kebebasan akademik, intoleransi dan radiikalisme, pengaruh eksternal, kurangnya sumber daya, dan tantangan multikulturalisme. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pendidikan yang menciptakan lingkungan yang demokratis.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, A., & Arif, M. (2019). Pendidikan Islam dan Tantangan Multikultural: Tinjauan Filosofis. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.31538/nzh.v2i2.339>
- Ardimen, et. al. (2018). Penguatan Budaya Meneliti. *Ta'dib*, 21(2), 75–85. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/batusangkar/FilePengajuanArtikel?id=50>
- Astari, A. (2021). Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 1035/E/Km/2020 Di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(1), 50–68. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i1.15846>
- Back, L. T., & Keys, C. B. (2020). Developing and testing the College Student Empowerment Scales for Racial/Ethnic Minorities. *Journal of Community Psychology*, 48(2), 482–502. <https://doi.org/10.1002/jcop.22257>
- Basri. Nawang Retno Dwiningrum. (2019). Potensi Radikalisme di Perguruan Tinggi. *JSHP*, 3(1), 84–91. <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/546/437>
- Brüssow, H. (2022). On opinion, freedom of speech and its responsibilities. *Microbial Biotechnology*, 15(10), 2507–2517. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.14119>
- Bunyamin. (2017). Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an. *Al-'Adl*, 10(1), 35–50. <https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2>
- Conger, J. A. (2003). Motivate Performance through Empowerment.
- Davies, M., & Barnett, R. (2015). The Palgrave handbook of critical thinking in higher education.
- Drerup, J. (2019). Education for Democratic Tolerance, Respect and the Limits of Political Liberalism. In *Journal of Philosophy of Education* (Vol. 00, Issue 0). <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1111/1467-9752.12337>
- Fajri, H. (2021). Demokrasi Pincang Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. *El-Riyasah*, 12(1), 108–128. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/13303/6616>
- Ferkany, M., & Creed, B. (2014). Intellectualist Aristotelian Character Education: An Outline And Assessment. <http://www.jubileecentre.ac.uk/432/character-education>.
- Hanafi, M. (2014). Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/572/554>
- Harahap. (2016). Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis dalam Pendidikan Islam MUSADDAD HARAHAAP. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhathariqah/article/view/621/324>
- Harriger, K. J. (2014). Deliberative Dialogue and the Development of Democratic Dispositions. *New Directions for Higher Education*, 2014(166), 53–61. <https://doi.org/10.1002/he.20095>
- Haryanto, S. (2020). Internalisasi Nilai Demokrasi Dan Humanisme. *Paramurobi*, 03(02), 114–128. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/2860/1702>
- Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. *Andragogi*, 8(2), 430–455. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121>
- Lalu Muhammad Nurul Wathan. (2020). Akhlak Tasawuf\_ Menyelami Kesucian Diri - Lalu Muhammad Nurul Wathoni - Google Buku (Dony Hendriawan, Ed.; Pertama). Forum Pemuda Aswaja.
- Maxcy, S. J. (1985). The Democratic "Myth" and The Search for a Rational Concept of Education. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.1985.tb00113.x>
- Muhammad Hanafi. (2013). CITA HUKUM. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>
- Muhtarom, A., Pada, D., Manajemen, J., Islam, P., Tarbiyah, F., Keguruan, D., Agama, I., Negeri, I., Hasanuddin, M., & Abstrak, B. (2009). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Profesionalitas Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Provinsi Banten. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,44239->
- Ng, J., Hu, X., Luo, M., & Chu, S. K. W. (2019). Relations Among Participation, Fairness and Performance in Collaborative Learning With Wiki-Based Analytics. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 463–467. <https://doi.org/10.1002/pra2.00048>
- Panjwani, F. (2012). Fazlur Rahman and the search for authentic Islamic education: A critical

- appreciation. *Curriculum Inquiry*, 42(1), 33–55. <https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2011.00574.x>
- Qur'an Kemenag. (2023). Website. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159>
- Rahman, M., Bakri, M., Busri, H., Zainullah, Z., & Rahmawati, R. K. N. (2020). Eksplorasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Pendidikan Pesantren Mu'adalah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(1), 39–58. <https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.1.39-58>
- Rapp, C., & Freitag, M. (2015). Teaching Tolerance? Associational Diversity and Tolerance Formation. *Political Studies*, 63(5), 1031–1051. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12142>
- Reymann, L. S., Fialkowski, G. M., & Stewart-Sicking, J. A. (2015). Exploratory Study of Spirituality and Psychosocial Growth in College Students. *Journal of College Counseling*, 18(2), 103–115. <https://doi.org/10.1002/jocc.12008>
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Rumambi, H. D., & Lintong, J. S. (2018). Implementasi Tanggungjawab Sosial Institusi Pendidikan Tinggi (Studi Pada Politeknik Negeri Manado). *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(2), 145–163. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2059>
- Shah, S. (2013). Educational leadership: An Islamic perspective. *British Educational Research Journal*, 32(3), 363–385. <https://doi.org/10.1080/01411920600635403>
- Smagorinsky, P. (2018). Character Education. In *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching* (pp. 1–6). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0111>
- Syuhud. (2019). muhaiq,+Journal+manager,+2013+A9+Siswanto. *Al-Tanzim*, 03(02), 37–48. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.658>
- UU.No.20 th 2003. (n.d.). Retrieved January 1, 2024, from <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>
- Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Juli 2021). <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=q4Q8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq#v=onepage&q&f=false>